

URGENSI REVITALISASI WAWASAN NUSANTARA DALAM MENJAWAB TANTANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Chelsea Farellina Tajudin
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: farellinachelsea@gmail.com

ABSTRAK

Wawasan Nusantara berperan sebagai landasan visional bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional yang adil dan merata. Sebagai negara kepulauan dengan keberagaman tinggi, Indonesia menghadapi tantangan seperti ketimpangan wilayah, melemahnya nasionalisme, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi, sehingga Wawasan Nusantara menjadi cara pandang yang menyatukan seluruh wilayah dan masyarakat dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wawasan Nusantara merupakan pedoman integrasi nasional dan dasar kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Namun, implementasinya terhambat oleh rendahnya pemahaman masyarakat, ketimpangan pembangunan, serta kurang optimalnya koordinasi pusat dan daerah. Oleh karena itu, revitalisasi melalui pendidikan, pembangunan merata, literasi digital, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan demi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci

Wawasan Nusantara, Integrasi Nasional, Pembangunan Berkelanjutan

ABSTRACT

Wawasan Nusantara serves as the visional foundation of Indonesia in maintaining unity and supporting fair national development. As an archipelagic country with high diversity, Indonesia faces challenges such as regional inequality, weakening nationalism, globalization, and information technology developments, making Wawasan Nusantara a perspective that unites all territories and people into a unified political, economic, socio-cultural, defense and security entity. This study uses a qualitative method with a juridical-normative approach and library research. The findings indicate that Wawasan Nusantara serves as a guide for national integration and social justice-oriented policy. However, its implementation is hindered by low public understanding, development inequality, and suboptimal central-regional coordination. Therefore, revitalization through education, equitable development, digital literacy, and public participation is essential for inclusive and sustainable national development.

Keywords

Wawasan Nusantara, National Integration, Sustainable Development

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang dari Sabang hingga Merauke, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan keanekaragaman suku, bahasa, budaya, dan agama yang luar biasa. Keragaman ini sekaligus menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, Wawasan Nusantara hadir sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang

mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan dalam satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. (Suryosumarto, 1997) Konsep ini bukan sekadar gagasan geopolitik semata, melainkan merupakan landasan visional bangsa yang kedudukannya berada tepat di bawah Pancasila dan UUD 1945 dalam hierarki paradigma nasional. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024b) Keragaman yang dimiliki Indonesia juga menuntut adanya kesadaran kolektif untuk tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara tidak hanya penting sebagai konsep negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Secara historis, gagasan tentang persatuan wilayah Nusantara telah tertanam sejak era pergerakan kemerdekaan. Proklamator Soekarno, dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, telah menegaskan pentingnya membangun satu negara nasional yang utuh dari ujung Sumatera hingga Papua sebagai syarat mutlak berdirinya bangsa yang kuat dan berdaulat. (Nugraheni & Najicha, 2023) Semangat ini kemudian dikukuhkan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang memproklamasikan kesatuan wilayah darat dan laut Indonesia. Dengan demikian, Wawasan Nusantara bukan konsep yang lahir tiba-tiba, melainkan buah perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam menetapkan landasan negara dan identitas nasionalnya. Hingga saat ini, semangat tersebut tetap relevan untuk menjawab berbagai persoalan kebangsaan yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

Dalam konteks pembangunan nasional, Wawasan Nusantara memiliki fungsi strategis sebagai kerangka integratif yang mempersatukan seluruh elemen bangsa menuju tujuan bersama, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. (Cahyaningrum Nur Aini & Marselina Angel Dwi, 2024) Wawasan Nusantara menjadi panduan normatif dalam perumusan kebijakan pembangunan, mulai dari kebijakan pertahanan, pembangunan ekonomi, hingga pelestarian sosial budaya. (Binawan, R. & Najicha, 2023) Namun demikian, realitas pembangunan Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan yang cukup signifikan antara wilayah barat dan timur, antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi pembangunan yang masih terpusat di Pulau Jawa menciptakan kesenjangan antar wilayah yang terus melebar dari pertengahan tahun 1990-an hingga saat ini. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024a) Ketimpangan ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga menyangkut akses terhadap infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan yang bermuara pada perbedaan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar daerah. (Hukum et al., 2025) Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan yang belum merata dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah. Wilayah yang tertinggal cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak. Jika dibiarkan, ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memicu ketidakpuasan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus dilaksanakan secara adil dan merata dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai persatuan dalam Wawasan Nusantara.

Tantangan pembangunan nasional semakin kompleks di era globalisasi. Arus informasi, teknologi, dan budaya asing yang masuk tanpa filter berpotensi menggerus nilai-nilai kebangsaan dan memperlemah identitas nasional, terutama di kalangan generasi muda. (Mulyati, 2020) Wawasan Nusantara masih menjadi acuan ideologis, tantangan serius muncul dalam bentuk fragmentasi sosial, melemahnya rasa nasionalisme, dan penetrasi budaya asing yang massif. (Adryawning & Widiyanto, 2025) Di sisi lain, kebijakan desentralisasi yang dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah ternyata juga membawa konsekuensi ketimpangan kapasitas antar pemerintah

daerah, yang justru dapat memperlebar kesenjangan pembangunan jika tidak dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai kesatuan Wawasan Nusantara. Perkembangan teknologi digital juga mempercepat penyebaran informasi tanpa batas, yang tidak semuanya berdampak positif. Masyarakat kini dihadapkan pada berbagai informasi yang belum tentu benar, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik. Dalam situasi seperti ini, diperlukan kemampuan untuk menyaring informasi sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan. Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya revitalisasi Wawasan Nusantara secara menyeluruh agar tidak sekadar menjadi konsep dalam dokumen kenegaraan, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan pembangunan, perilaku warga negara, dan sistem pendidikan nasional. (Tasya Fais Prabowo, Viora Hustika, 2025)

Implementasi Wawasan Nusantara melalui pendidikan kewarganegaraan menunjukkan efektivitas yang bervariasi, dengan keberhasilan lebih tinggi pada pendidikan dasar dibandingkan pendidikan tinggi, sehingga diperlukan inovasi pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Revitalisasi juga perlu menyentuh aspek ekonomi, karena pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di semua wilayah merupakan wujud nyata dari semangat persatuan dan keadilan sosial yang menjadi inti Wawasan Nusantara. Upaya revitalisasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat jangka pendek. Diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa nilai-nilai Wawasan Nusantara benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, baik melalui kebijakan pemerintah yang berpihak pada pemerataan pembangunan maupun melalui partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagai penelitian telah mengkaji aspek-aspek parsial dari Wawasan Nusantara, seperti perannya dalam membangun nasionalisme, keterkaitannya dengan ketahanan nasional, serta relevansinya sebagai prinsip pembangunan hukum nasional. Namun, kajian yang secara komprehensif membahas urgensi revitalisasi Wawasan Nusantara dalam menjawab tantangan pembangunan nasional yang multidimensi masih terbatas. Kesenjangan inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan, yaitu untuk menganalisis secara kritis bagaimana Wawasan Nusantara dapat direvitalisasi sebagai instrumen yang efektif dalam menjawab tantangan pembangunan nasional Indonesia yang semakin kompleks di era kontemporer. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasinya di berbagai bidang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai urgensi revitalisasi Wawasan Nusantara dalam menjawab tantangan pembangunan nasional di Indonesia. Pendekatan ini tidak berfokus pada angka atau data statistik semata, melainkan lebih menekankan pada pemahaman terhadap fenomena sosial, konsep, serta nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena penelitian ini berlandaskan pada kajian terhadap norma-norma hukum, konsep-konsep dasar, serta teori yang berkaitan dengan Wawasan Nusantara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini, Wawasan Nusantara tidak hanya dipahami sebagai konsep

geopolitik, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional yang adil dan merata. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai paling relevan untuk mengkaji bagaimana peran dan fungsi Wawasan Nusantara dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *library research*, yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan Wawasan Nusantara dan pembangunan nasional. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui hasil penelitian terdahulu, literatur ilmiah, serta dokumen resmi yang telah dipublikasikan, mencakup berbagai hasil kajian akademik mengenai Wawasan Nusantara, pembangunan nasional, ketahanan nasional, serta isu-isu lain yang mendukung analisis penelitian. Penggunaan data sekunder memungkinkan penulis untuk mengkaji berbagai perspektif yang telah ada sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam, komprehensif, dan mampu menjawab permasalahan penelitian secara sistematis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, serta mengkaji berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam proses ini, penulis melakukan seleksi ketat terhadap sumber-sumber yang digunakan agar sesuai dengan kebutuhan penelitian serta memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep dasar Wawasan Nusantara, peran Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di berbagai daerah. Pengelompokan data tersebut bertujuan untuk mempermudah proses analisis dan membantu penulis dalam menyusun pembahasan yang sistematis dan terstruktur sehingga setiap data yang diperoleh dapat dihubungkan secara logis sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara menguraikan, menjelaskan, serta menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Untuk menjaga keabsahan data, penulis melakukan pengecekan silang terhadap berbagai referensi yang relevan agar data yang digunakan tidak bersifat subjektif atau bias, melainkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui penggunaan metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat dalam memperkuat implementasi Wawasan Nusantara sebagai landasan pembangunan nasional yang adil, merata, dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan dan Fungsi Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. (Siregar et al., 2025) Konsep ini menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia, baik darat, laut, maupun udara, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pengertian yang lebih luas,

Wawasan Nusantara juga mencakup kesatuan dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ideologis dan filosofis bangsa Indonesia. Pemahaman terhadap Wawasan Nusantara menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Wawasan Nusantara berfungsi sebagai dasar dalam membentuk pola pikir masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam praktiknya, cara pandang ini menuntut setiap individu untuk tidak melihat Indonesia sebagai bagian-bagian yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Cara berpikir seperti ini menjadi penting terutama dalam menghadapi berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Tanpa adanya kesadaran tersebut, potensi konflik akibat perbedaan bisa semakin besar. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Dalam konteks pembangunan nasional, Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai landasan visional yang mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan. Setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya daerah tertentu. (Judijanto et al., 2024) Hal ini penting karena pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang berdampak pada ketidakstabilan nasional. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara merata dan berkeadilan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pendekatan pembangunan yang berbasis Wawasan Nusantara juga dapat memperkuat integrasi nasional. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini juga mendorong adanya pemerataan prioritas pembangunan, sehingga wilayah yang selama ini tertinggal dapat memperoleh perhatian lebih. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada daerah yang merasa diabaikan. Dengan begitu, rasa memiliki terhadap negara akan semakin kuat di seluruh lapisan masyarakat.

Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah. Dalam praktiknya, pembangunan yang terlalu terpusat di satu wilayah dapat menimbulkan ketimpangan yang cukup signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan dapat memicu konflik sosial jika tidak ditangani dengan baik. (Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan et al., 2021) Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan perhatian yang sama dalam pembangunan. Selain itu, kebijakan yang diambil juga harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Keseimbangan ini juga penting untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Jika hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan pembangunan dapat mengalami hambatan. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang efektif menjadi hal yang sangat diperlukan.

Selain sebagai pedoman kebijakan, Wawasan Nusantara juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, nilai-nilai persatuan menjadi sangat penting untuk menjaga keutuhan negara. Di tengah arus globalisasi, masuknya budaya asing dapat memengaruhi identitas nasional jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. (Nasional et al., 2025) Oleh karena itu, penguatan Wawasan Nusantara menjadi salah satu cara untuk mempertahankan jati diri bangsa. Hal ini juga penting dalam membangun rasa nasionalisme, khususnya di kalangan generasi muda. Dengan adanya kesadaran nasional

yang kuat, masyarakat akan lebih mudah untuk bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam kehidupan sosial, fungsi ini terlihat dari kemampuan masyarakat untuk tetap menjaga toleransi di tengah perbedaan. Nilai persatuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga harus tercermin dalam interaksi sehari-hari. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi fondasi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Dalam bidang hukum, Wawasan Nusantara berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan nasional. Setiap kebijakan hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian, Wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam pembangunan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan. (Sulistiyono & Rochwulaningsih, 2024) Selain itu, hukum yang berbasis pada Wawasan Nusantara juga dapat memperkuat integrasi nasional. Hal ini karena hukum tersebut mampu mengakomodasi kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Penerapan hukum yang adil juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil, maka mereka akan lebih mendukung kebijakan pemerintah. Hal ini tentu berdampak positif terhadap stabilitas nasional.

Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai alat integrasi nasional yang mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Integrasi ini tidak hanya mencakup aspek wilayah, tetapi juga mencakup kesatuan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan adanya integrasi yang kuat, pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, integrasi yang baik juga dapat meningkatkan stabilitas nasional. Oleh karena itu, Wawasan Nusantara harus terus diperkuat agar mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan yang ada. Integrasi ini juga menjadi dasar dalam menciptakan kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan. Setiap daerah dapat saling melengkapi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bersifat kompetitif, tetapi juga kolaboratif.

Selain fungsi-fungsi tersebut, Wawasan Nusantara juga memiliki peran sebagai arah dalam pembangunan karakter bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat membentuk sikap masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan, toleransi, dan rasa tanggung jawab. Dalam konteks ini, Wawasan Nusantara tidak hanya berkaitan dengan kebijakan negara, tetapi juga dengan pembentukan kepribadian warga negara. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ini perlu dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan karakter bangsa yang kuat, pembangunan nasional akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Wawasan Nusantara juga berperan dalam memperkuat ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya Wawasan Nusantara, setiap unsur dalam masyarakat dapat saling mendukung dalam menghadapi berbagai ancaman. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan Wawasan Nusantara menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional.

Dalam era modern, Wawasan Nusantara juga memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi tantangan globalisasi. Perkembangan teknologi dan informasi menuntut masyarakat untuk tetap memiliki identitas nasional yang kuat. Tanpa adanya dasar yang kuat, masyarakat dapat dengan mudah terpengaruh oleh budaya luar. Oleh karena itu,

Wawasan Nusantara perlu terus diaktualisasikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya menjadi warisan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi masa depan.

b. Faktor yang Menghambat Implementasi Wawasan Nusantara

Implementasi Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Salah satu faktor utama adalah pengaruh globalisasi yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat. (Nugraheni & Najicha, 2023) Globalisasi membawa perubahan yang sangat cepat, terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Arus informasi yang tidak terbatas membuat masyarakat lebih mudah terpapar budaya asing. Hal ini dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Jika tidak disikapi dengan bijak, globalisasi dapat melemahkan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat Wawasan Nusantara sebagai filter dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh ini bahkan bisa terlihat dari cara berpikir dan gaya hidup yang semakin menjauh dari nilai kebersamaan. Banyak individu mulai lebih menekankan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama, sehingga rasa solidaritas perlahan menurun. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan semangat Wawasan Nusantara yang menempatkan persatuan sebagai prioritas utama.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Wawasan Nusantara juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep ini secara mendalam. Hal ini menyebabkan nilai-nilai Wawasan Nusantara belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemahaman ini juga berdampak pada rendahnya rasa nasionalisme di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mudah mengimplementasikan nilai-nilai Wawasan Nusantara. Di lapangan, sering kali konsep ini hanya dikenal sebagai istilah tanpa benar-benar dipahami maknanya. Masyarakat mungkin pernah mendengar, tetapi tidak tahu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Akibatnya, nilai-nilai yang seharusnya menjadi pedoman justru tidak terasa dalam praktik sehari-hari.

Ketimpangan pembangunan antar daerah juga menjadi faktor penghambat yang cukup serius. Pembangunan yang masih terpusat di wilayah tertentu menyebabkan daerah lain mengalami keterbatasan dalam berbagai sektor. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup besar. Kesenjangan tersebut dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Daerah yang tertinggal cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga kesenjangan semakin terasa. Situasi seperti ini bisa membuat sebagian masyarakat merasa tidak diperhatikan, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan rasa persatuan.

Faktor lain yang turut menghambat implementasi Wawasan Nusantara adalah lemahnya sistem pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan yang seharusnya menjadi sarana utama dalam membentuk karakter bangsa masih belum optimal. (Hidayah et al., 2024) Metode pembelajaran yang kurang menarik membuat siswa kurang memahami pentingnya Wawasan Nusantara. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode pembelajaran agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dengan pendidikan yang baik, generasi muda dapat menjadi agen

perubahan dalam memperkuat Wawasan Nusantara. Sering kali materi disampaikan secara teoritis tanpa dikaitkan dengan realitas yang dekat dengan kehidupan siswa. Hal ini membuat pembelajaran terasa jauh dan kurang bermakna. Padahal, jika dikaitkan dengan situasi nyata, siswa akan lebih mudah memahami dan merasakan pentingnya nilai-nilai tersebut.

Kebijakan desentralisasi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi implementasi Wawasan Nusantara. Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengelola pembangunan. (Mahayani, 2024) Perbedaan kapasitas ini dapat memperlebar kesenjangan antar daerah. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang baik antara berbagai pihak agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal.

Dalam praktiknya, arah kebijakan di beberapa daerah juga tidak selalu sejalan dengan tujuan nasional. Hal ini bisa terjadi karena adanya kepentingan lokal yang lebih diutamakan dibandingkan kepentingan bersama. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat menghambat terciptanya pembangunan yang terintegrasi.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri. Penyebaran informasi yang tidak terkontrol dapat memicu munculnya hoaks dan disinformasi. (Armaid, 2016) Hal ini dapat memecah belah masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Dengan demikian, mereka dapat menyaring informasi yang diterima dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang tidak benar. Fenomena ini semakin terlihat dengan adanya media sosial yang mempercepat penyebaran informasi tanpa batas. Banyak informasi yang langsung dipercaya tanpa proses verifikasi, sehingga memicu kesalahpahaman di masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperlemah kepercayaan antar kelompok dan memicu perpecahan.

Di samping faktor-faktor tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum terlibat secara aktif dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk perencanaan maupun pengawasan. Kondisi ini membuat pembangunan cenderung berjalan satu arah tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum yang belum sepenuhnya konsisten di berbagai daerah. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil, kepercayaan masyarakat terhadap negara dapat menurun. Hal ini tentu berdampak pada melemahnya semangat persatuan yang menjadi dasar Wawasan Nusantara. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi Wawasan Nusantara.

Perubahan sosial yang terjadi secara cepat juga turut memengaruhi implementasi Wawasan Nusantara. Perubahan ini mencakup cara berpikir, pola interaksi, hingga nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat sering kali mengalami kebingungan dalam menentukan nilai yang harus dipegang. Jika tidak diimbangi dengan penguatan nilai kebangsaan, kondisi ini dapat mengarah pada melemahnya identitas nasional.

4. KESIMPULAN

Wawasan Nusantara merupakan landasan visional bangsa Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, memperkuat integrasi nasional, serta mengarahkan pembangunan nasional agar berjalan secara adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menghadapi tantangan pembangunan di era globalisasi, seperti ketimpangan antar daerah, melemahnya nasionalisme, pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi informasi, penyebaran hoaks, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, revitalisasi Wawasan Nusantara menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Wawasan Nusantara masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari lemahnya pendidikan kebangsaan, kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga ketidakmerataan pembangunan yang dapat memicu kesenjangan sosial dan mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, revitalisasi Wawasan Nusantara perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan pendidikan karakter dan nasionalisme, pemerataan pembangunan, peningkatan literasi digital, penegakan hukum yang adil, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar nilai-nilai persatuan dan keadilan sosial dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Wawasan Nusantara tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional serta memperkuat identitas dan ketahanan bangsa Indonesia di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adryawning, V. A., & Widiyanto, D. (2025). Analisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan wilayah di Indonesia. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 210.
<https://doi.org/10.20961/region.v20i1.86894>
- Armaidly, A. (2016). Pengembangan Wawasan Nasional Menuju Ketahanan Nasional. In *Ketahanan Nasional* (Vol. 14, Number 3, pp. 1–13).
<https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22302>
- Binawan, R., & Najicha, F. U. (2023). Peranan Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Dalam Mengatasi Konflik Nasional. In *AZZAHRA: Scientific Journal of Social Humanities* (Vol. 1). https://journal.csspublishing/index.php/azza_hra.1, 175–185.
- Cahyaningrum Nur Aini, & Marselina Angel Dwi. (2024). Wawasan Nusantara: Konsep Dan Implementasinya Dalam Memperkuat Identitas Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 231–238.
- Hidayah, C., Trisiana, A., Nurfarah, A., & Hariadi, M. A. (2024). Pentingnya Wawasan Nusantara Untuk Menjaga Keutuhan NKRI. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 12(3), 1–12.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/35579>
- Hukum, F., Jambi, U., Hukum, F., Jambi, U., Ramadhani, D. I., Hukum, F., Jambi, U., Rizki, M., Hukum, F., Jambi, U., Rusdan, M., Hukum, F., & Jambi, U. (2025). Analisis Peran Desentralisasi sebagai Solusi untuk Mengatasi Ketimpangan Pembangunan di daerah. 3(1), 28–33.
- Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, J., Annisa, H., & Ulfatun Najicha, F. (2021).

- Wawasan Nusantara Dalam Memcahkan Konflik Kebudayaan Nasional*. (2).
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/....http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...>
- Judijanto, L., Adiwijaya, S., & Marjan, M. (2024). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Navigasi terhadap Degradasi Lingkungan di Sekitar IKN. *Jurnal Geosains West Science*, 2(03), 112–121. <https://doi.org/10.58812/jgws.v2i03.1677>
- Mahayani, N. M. H. (2024). GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Mulyati, M. (2020). Wawasan Nusantara Sebagai Sarana Pembangunan Nasional Dan Pembentukan Karakter Bangsa. *Jantra.*, 15(1), 43–50.
<https://doi.org/10.52829/jantra.v15i1.131>
- Nasional, S., Matematika, P., & Bojonegoro, I. P. (2025). *Prosiding*. 813–821.
- Nugraheni, S. D., & Najicha, F. U. (2023). WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN RASA DAN SIKAP NASIONALISME WARGA NEGARA : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, (1).
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024a). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Navigasi terhadap Degradasi Lingkungan di Sekitar IKN*. 2(2), 306–312.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024b). *PERAN WAWASAN NUSANTARA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA*. 2, 306–312.
- Siregar, W. S., Nainggolan, T. E., Louis, Y., Lase, P., Ivanna, J., & Fadillah, A. N. (2025). Wawasan Nusantara Sebagai Pilar Geopolitik Indonesia: Strategi Integrasi Nasional di Era Dinamika Global. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 8166–8174. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Sulistiyono, S. T., & Rochwulaningsih, Y. (2024). Pentingnya Wawasan Sejarah dan Kebangsaan pada Negara-Bangsa Plural: Persoalan Integrasi dan Disintegrasi di Indonesia pada Abad XXI. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 8(2), 91–103.
<https://doi.org/10.14710/jscl.v8i2.60316>
- Suryosumarto, B. (1997). Wawasan Nusantara Dan Ketahanan Nasional. In *Ketahanan nasional* (Number wawasan nusantara dan ketahanan nasional dalam kehidupan nasional dan perencanaan pembangunan).
- Tasya Fais Prabowo, Viora Hustika, N. (2025). Wawasan Nusantara sebagai Prinsip Pembangunan Hukum. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 46–55.